BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era otonomi fiskal dan globalisasi ini sudah menjadikan pertanyaan tentang akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebagai hal yang sangat penting. Semakin banyak masyarakat di Indonesia menuntut keterbukaan dan tanggung jawab dari pemerintah mereka dalam hal pengeluaran uang. Manajemen keuangan yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah, begitu pula penyediaan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen utama pada menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) turut berperan sebagai instrumen yang berpotensi meningkatkan transparansi dan memperkuat tata kelola pemerintahan (IMF, 2023).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah-daerah di Indonesia, pemerintah daerah mulai memainkan peran yang semakin penting dalam pertumbuhan negara secara keseluruhan. Mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan, peraturan ini menyediakan wewenang yang besar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Namun, tingkat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih diawasi sebagai akibat dari kekuasaan ini. Kualitas laporan keuangan turut terpengaruh secara negatif oleh

fakta bahwa banyak pemerintah daerah masih menghadapi beberapa kendala ketika mencoba menerapkan SAP.

Laporan keuangan berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan yang mampu menyajikan informasi secara benar dan jujur, serta memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Laporan keuangan berkualitas sangat penting karena data yang disajikan menjadi dasar keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (GASB, 1999). Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat diperkuat lebih lanjut dengan penyebaran data keuangan yang akurat.

Komponen penting yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah penerapan SAP, yang membutuhkan basis akrual dan pelaporan yang seragam. Banyak orang berpikir bahwa penerapan SAP akan membuat laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik karena diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk merancang manajemen keuangan pemerintah daerah lebih akuntabel dan jelas serta memberikan data keuangan kepada pemangku kepentingan yang membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang relevan terhadap undang-undang akuntansi pemerintah yang relevan dimaksudkan untuk menyediakan data yang lebih andal, relevan, dan akuntabel.

Pemerintahan Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini mencerminkan pentingnya penerapan SAP dan optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (IHPD, 2021). Meskipun demikian, Sihaloho *et al.* (2024), menyatakan bahwa pemahaman sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual masih menjadi perhatian dalam proses penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan SAP dan optimalisasi SIPD perlu terus ditingkatkan agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertahankan secara konsisten.

Studi Mahmud & Lukum (2023) menemukan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo mendapat manfaat besar dari penerapan SAP. Temuan tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan Pratiwi (2024) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Medan, yang menemukan implementasi SAP secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemda Medan.

Dalam upaya mendukung penerapan SAP yang lebih optimal, pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah. Salah satu sistem yang digunakan pemerintah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak 2019. SIPD dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan secara digital. Melalui sistem ini, pengelolaan informasi keuangan daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu juga membahas bagaimana sistem informasi dan standar akuntansi mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Penelitian Dewi (2023) menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh penerapan SIPD. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan TIK merupakan sebuah komponen penting yang menetapkan seberapa baik laporan keuangan Pemda. Selaras dengan itu, Wulandari & Yuliati (2023) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan Pemda meningkat signifikan setelah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, ini menunjukkan laporan keuangan dapat disediakan secara lebih akurat dan andal melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Yanto (2024) melakukan penelitian tambahan yang menjabarkan penggunaan TI meningkatkan kualitas LKPD karena memungkinkan data keuangan dicatat, diolah, dan disampaikan lebih akurat dan tepat waktu. Namun demikian, penelitian Dwirini (2023) menemukan hasil yang berbeda, menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi tidak berdampak signifikan pada kualitas. Temuan yang berbeda menjabarkan tingkat keberhasilan TI dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh kondisi pelaksanaan dan karakteristik dari setiap pemerintah daerah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menempatkan penerapan SIPD sebagai variabel independen yang langsung memengaruhi kualitas laporan keuangan, penelitian ini menempatkan penerapan SIPD sebagai variabel moderasi hubungan antara penerapan SAP dan kualitas LKPD.

Selain itu, implementasi SIPD di Indonesia hingga saat ini juga belum berjalan secara merata. Beberapa pemerintah daerah masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, kesiapan sumber daya manusia, serta resistensi organisasi dalam proses adopsi sistem, sehingga potensi SIPD belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal (Dewi *et al*., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPD dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda belum sepenuhnya maksimal dan masih memerlukan kajian empiris lebih lanjut.

Dalam perspektif teori institusional, perubahan dan penyesuaian pada tata kelola keuangan Pemda dapat dipahami menjadi respons terhadap tekanan regulatif dan normatif yang bersumber dari pemerintah pusat, lembaga pengawas, serta ekspektasi masyarakat. Tekanan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem, prosedur, dan standar formal, seperti implementasi SAP dan pemanfaatan SIPD, guna memperoleh legitimasi serta menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dipandang menjadi kewajiban administratif, sekaligus menjadi strategi institusional dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, urgensi penelitian ini semakin meningkat pada era digitalisasi pasca-pandemi, seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan, khususnya di Kota Medan. Perkembangan teknologi informasi serta tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan mendorong

pemerintah daerah untuk menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan agar lebih terintegrasi, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas proses perencanaan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan agar sejalan dengan regulasi dan praktik tata kelola yang baik.

Peningkatan kualitas penerapan SAP serta optimalisasi pemanfaatan SIPD menjadi aspek penting pada tata kelola keuangan pemerintah daerah. Perbaikan yang berkelanjutan pada kedua aspek tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penerapan SIPD juga dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi pemerintah daerah terhadap tuntutan regulasi dan praktik pengelolaan keuangan yang semakin terintegrasi. Namun, implementasinya di berbagai daerah masih menunjukkan perbedaan tingkat pemanfaatan yang dipengaruhi oleh kesiapan SDM, pemahaman pengguna, serta ketersediaan infrastruktur teknologi, sehingga perannya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan masih harus dikaji lebih komprehensif secara empiris.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menjadi penting dalam menganalisis **"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Variabel Moderasi"**. Studi ini mengimplementasikan pendekatan kuantitatif yang menelaah data primer melalui kuesioner dalam mendapatkan fakta empiris terkait hubungan antar variabel tersebut. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan

kontribusi akademik tetapi juga membantu Pemerintah Kota Medan meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjabaran yang ada, peneliti bisa merumuskan masalah seperti:

1. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal.
3. Implementasi SIPD belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan teknis, kesiapan infrastruktur, dan tingkat pemanfaatan sistem yang belum merata.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, serta untuk menghindari interpretasi yang beragam terhadap permasalahan yang akan diuji, maka perlu ditetapkan batasan masalah agar fokus dan ruang lingkup penelitian kian jelas. Penelitian ini terfokus untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan SIPD sebagai variabel moderasi.

Objek pada studi ini dibatasi pada OPD di Pemerintah Kota Medan dengan unit analisis berupa OPD. Responden yang diambil ialah pejabat yang turut serta pada pengelolaan dan pelaporan keuangan setiap OPD. Data yang dikaji ini berasal dari data primer yang diberikan kepada responden melalui kuesioner. Faktor-faktor lain di luar domain keuangan dan sistem informasi tidak dibahas dalam penelitian ini misalnya, faktor-faktor politik, sosial, atau budaya organisasi.

1.4 Rumusan Masalah

Dari penjabaran sebelumnya, rumusan masalah yang hendak dikaji ialah:

1. Apakah penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah SIPD memoderasi pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui peran SIPD dalam memoderasi pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Temuan studi ini diproyeksikan bisa menguntungkan banyak pihak, yang termasuk yang berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Temuan studi ini diproyeksikan bisa berkontribusi pada pembaharuan kajian akuntansi sektor publik, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah yang terhubung ke teknologi informasi seperti SIPD. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akademis tentang hubungan antara penerapan SAP dan kualitas LKPD.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Temuan studi ini diproyeksikan bisa dijadikan referensi dan dasar empiris bagi studi selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan peran TI pada tata kelola keuangan sektor publik atau penelitian yang mengkaji variabel lain yang berpotensi memoderasi hubungan penerapan SAP dan kualitas LKPD.

2. Manfaar Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis bisa meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam melakukan penelitian, khususnya dalam menganalisis pengelolaan keuangan Pemda dan implementasi sistem informasi dalam mendukung laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

b. Bagi Universitas

Temuan studi ini diproyeksikan bisa berfungsi sebagai referensi akademik serta bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan sistem informasi pemerintahan.

c. Bagi Pemerintahan Kota Medan

Diharapkan penelitian ini akan membantu pemerintah Kota Medan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, terutama dengan menerapkan SAP dan mengoptimalkan penggunaan SIPD untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.